

**PERSEPSI GURU TERHADAP PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD NEGERI
KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :

**Rasli Nurtin
NIM . 70926**

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Persepsi Guru terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang

N a m a : Rasli Nurtin

NIM : 70926

Jurusan : Administrasi Pendidikan

Fakultas : Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2009

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed
NIP. 132 101 145**

**Dra. Elizar Ramli, M.Pd
NIP. 131 599 000**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang**

PERSEPSI GURU TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD NEGERI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG

N a m a : Rasli Nurtin
NIM : 70926
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2008

Tim Penguji

	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	: 1. Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed	1. _____
Sekretaris	: 2. Dra. Elizar Ramli, M.Pd	2. _____
Anggota	: 3. Dra. Nelfia Adi, M.Pd	3. _____
Anggota	: 4. Dra. Rifma, M.Pd	4. _____
Anggota	: 5. Drs. Yuskal Kusman, M.Pd	5. _____

A B S T R A K

JUDUL : Persepsi Guru terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang

PENULIS : Rasli Nurtin

PEMBIMBING : 1. Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed
2. Dra. Elizar Ramli, M.Pd

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Padang masih kurang sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan. Perumusan masalah adalah bagaimanakah persepsi guru terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi tentang: persepsi guru terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilihat dari: penyusunan rencana penggunaan dana, pelaksanaan penggunaan dana, dan pelaporan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimanakah proses penyusunan rencana penggunaan dana BOS, proses penggunaan dana BOS, dan proses pelaporan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang ?.

Populasi penelitian adalah seluruh guru SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang berjumlah 241 Orang yang tersebar pada 20 SD Negeri. Sampel adalah 25 % dari masing-masing SD yang ada. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Proportional Random Sampling*, sehingga jumlah sampel yang diperoleh adalah 60 Orang. Alat pengumpul data adalah angket yang dirumuskan berdasarkan model *Skala Likert*. Berdasarkan hasil uji coba angket dapat disimpulkan bahwa angket adalah valid dengan $\rho_{xy} = 0,760$ pada taraf kepercayaan 95% dengan $N = 10$ adalah 0,632. Sedangkan ρ hitung 0,760. Jadi ρ hitung $>$ ρ tabel ($0,760 > 0,632$) dan reliabel pada tingkat kepercayaan 95%

yaitu r hasil (0,701) > r tabel (0,632). Pengolahan data dilakukan dengan Mean atau skor rata-rata.

Hasil pengolahan data pada penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) persepsi guru terhadap penyusunan rencana penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang cukup baik, dengan skor rata-rata 2,61, (2) persepsi guru terhadap pelaksanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang kurang baik, dengan skor rata-rata 2,30, dan (3) persepsi guru terhadap pelaporan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang cukup baik, dengan skor rata-rata 2,56.

Berdasarkan hasil penelitian secara umum dapat dikatakan bahwa persepsi guru terhadap pengelolaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang kurang baik, dengan skor rata-rata 2,49. Ini berarti bahwa pengelolaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang kurang terlaksana dengan baik.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis aturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan PetunjukNya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **“Persepsi Guru terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang”**.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Starata Satu (S1) pada Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Selesaiannya penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang dalam kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed dan Ibu Dra. Elizar Ramli, M.Pd selaku dosen Pembimbing I dan pembimbing II yang telah dengan ketabahan membimbing penulis untuk menyelesaikan Penelitian ini
2. Staf dosen beserta karyawan Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNP
3. Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
5. Rektor Universitas Negeri Padang
6. Suamiku yang selalu setia mendampingi dalam penyelesaian Skripsi ini
7. Rekan-rekan yang telah ikut memberikan bantuan kepada penulis
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang penulis susun ini masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pihak atau pembaca yang budiman untuk kesempurnaan tulisan ini di masa mendatang.

Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa mendatang. Amin

Padang, Februari 2009
Penulis,

Rasli Nurtin
NIM. 70926

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah	3
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Pertanyaan Penelitian	4
F. Asumsi	5
G. Kegunaan Penelitian	5
BAB II KERANGKA TEORETIS	
A. Kajian Teoretis	6
B. Kerangka Konseptual	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Populasi Penelitian	25
C. Variabel Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Instrumen Penelitian	29
F. Pengumpulan Data	31
G. Teknik dan Prosedur Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Deskripsi Data	34
B. Pembahasan Hasil Penelitian	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Guru SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang Menjadi Populasi Penelitian	26
2. Jumlah Guru SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang Menjadi Sampel Penelitian	28
3. Skor Rata-rata Penyusunan Rencana Penggunaan Danas BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang	35
4. Skor Rata-rata Pelaksanaan Penggunaan Danas BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang	37
5. Skor Rata-rata Pelaporan Penggunaan Dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang	39
6. Rekapitulasi Skor Rata-rata Persepsi Guru terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang	41

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Nomor :

1. Kerangka Konseptual Penelitian tentang Persepsi Guru terhadap
Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri
Kecamatan Nanggalo Kota Padang 24

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Nomor :

1. Kisi-kisi Penelitian	55
2. Angket Penelitian	56
3. Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian	61
4. Pengolahan Data Penelitian	65
5. Izin Penelitian dari FIP UNP	68
6. Izin Penelitian dari UPTD Pendidikan Kecamatan Nanggalo	
7. Kota Padang	69
8. Izin Penelitian dari SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia berakibat pada menurunnya kemampuan orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan masih banyak anak-anak di jenjang pendidikan dasar yang terpaksa harus berhenti sekolah hanya dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya. Pada hal pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting sekali dalam mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan membutuhkan biaya yang sangat besar, sebagian besar biaya itu masih dibebankan kepada orang tua murid. Sementara itu sebagian besar masyarakat kita masih berada dibawah garis kemiskinan. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Mengingat amanat Undang-undang tersebut pemerintah menggulirkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), dengan harapan dapat meringankan

beban orang tua murid yang kurang mampu, terhadap biaya pendidikan anaknya di sekolah yang semakin lama semakin tinggi.

Dana BOS yang digulirkan ditujukan khusus untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang merupakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pengambilan dana BOS dengan cara pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan berpedoman pada Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Pada kenyataannya setelah dana BOS digulirkan masih ditemui gejala-gejala yang kurang menggembirakan bahwa dana BOS belum memberikan pengaruh yang nampak pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, dalam perencanaan pemanfaatan dana BOS kepala sekolah masih membuat perencanaan yang belum matang untuk dilaksanakan dengan bukti kepala sekolah masih merasakan kekurangan dana untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kekurangan dana di sekolah untuk memberikan pelayanan buku pokok/pegangan pada siswa tidak dapat dilakukan untuk satu siswa satu buku. Siswa tersebut harus 1 (satu) buku dengan 2-3 orang. Dan dalam pemanfaatan dana masih ada juga kepala sekolah yang belum transparansi dalam pengelolaan BOS di sekolah yang dipimpinnya, sehingga timbul kecurigaan warga sekolah terhadap pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah enggan memberikan wewenangnya kepada personil sekolah lainnya untuk mengelola dana BOS, sehingga dalam pertanggungjawabannya kepala sekolah membuat laporan pertanggungjawabannya sendiri, akibatnya ada beberapa sekolah yang terlambat dalam menyerahkan laporannya ke Dinas

setempat. Hal ini juga mengakibatkan timbulnya berbagai pendapat dan tanggapan terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh kepala sekolah tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Persepsi Guru Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang”**.

B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Menurut Depdiknas (2005) pengelolaan dana BOS meliputi beberapa kegiatan antara lain perencanaan, penggunaan, pencatatan data (buku kas), monitoring, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Adapun jenis penggunaan dana BOS menurut Depdiknas dan Depag (2006) antara lain meliputi: (1) pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru, (2) pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan, (3) pembelian bahan-bahan habis pakai, (4) pembiayaan kegiatan siswa, (5) pembiayaan ulangan harian, ulangan umum dan laporan hasil belajar siswa, (6) pengembangan profesi guru, (7) pembiayaan perawatan sekolah, (8) pembiayaan langganan daya dan jasa, (9) pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan, (10) pemberian bantuan untuk transportasi siswa miskin, (11) pembiayaan pengelolaan BOS, dan (12) biaya asrama/pondokan dan pembelian peralatan ibadah khusus untuk pesantren Salafiyah.

Mengingat luasnya ruang lingkup penggunaan dana BOS supaya pembahasan lebih fokus maka penulis membatasi penelitian ini:

1. Penyusunan rencana penggunaan dana BOS
2. Pelaksanaan penggunaan dana BOS
3. Pelaporan penggunaan dana BOS

C. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah: “bagaimanakah persepsi guru terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan Persepsi guru terhadap:

1. Penyusunan rencana penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
2. Penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Kota Padang.
3. Pelaporan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

E. Pertanyaan Penelitian

Sehubungan dengan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah persepsi guru terhadap proses penyusunan rencana penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang ?
2. Bagaimanakah persepsi guru terhadap proses penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang ?
3. Bagaimanakah persepsi guru terhadap proses pelaporan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang ?

F. Asumsi

Penelitian ini bertitik tolak dari asumsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana BOS yang diterima oleh sekolah perlu dilaksanakan sesuai petunjuk yang telah ditentukan.
2. Penggunaan dana BOS harus disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang telah dibuat.
3. Pertanggung jawaban penggunaan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah.

G. Kegunaan Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian diharapkan berguna bagi :

1. Kepala Sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS
2. Pengawas TK/SD dalam mengawasi dan menertibkan administrasi serta manajemen keuangan dana BOS
3. Dinas Pendidikan Kota Padang dalam memberikan petunjuk tentang tata cara pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan dana BOS.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Konsep Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*perception*" yang dikutip dari The Contemporary English Indonesian Dictionary (1986:1384). Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "*perception*" berarti opini, tanggapan dan pandangan terhadap sesuatu peristiwa atau kejadian. Batasan-batasan tersebut tentu sesuai dengan pandangan mereka masing-masing. Handoko (1994: 285) misalnya mendefinisikan persepsi sebagai "suatu proses yang menyeluruh dengan mana seseorang menseleksi, mengorganisasikan, dan mengartikan segala sesuatu di lingkungannya."

Sejalan dengan pendapat di atas Thoha (1993:125) menyatakan: "Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman ". Hal ini tak jauh berbeda dengan pendapat Mar'at (1981: 22) "Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang bersumber dari komponen kognitis". Maksudnya seseorang akan menganggap hasil pengamatannya apabila ia mempunyai pengetahuan tentang objek yang diamati itu.

Selanjutnya Koentjaraningrat (1983: 11), menjelaskan pula bahwa “Persepsi adalah proses akal manusia yang saat dan dipancarkan atau diproyeksikan menjadi sesuatu pengamatan tentang lingkungan sesuatu”. Menurut Santoso yang dikutip Mudjiran (1988: 25) menjelaskan “Persepsi adalah sesuatu pengamatan, pengorganisasian dan penilaian terhadap suatu objek yang didasari oleh suatu pemikiran dan pengetahuan”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan yang dimaksud persepsi merupakan suatu proses pengamatan dan pemikiran seseorang terhadap suatu objek yang sangat menentukan reaksinya terhadap objek tersebut. Persepsi juga dapat diartikan bagaimana seseorang mengartikan, mengamati situasi atau keadaan tertentu, setiap individu dalam mengamati atau memandang keadaan tertentu pada dasarnya mempunyai perbedaan-perbedaan oleh sebab itu mengakibatkan reaksi individu terhadap hal yang sama akan berbeda pula.

b. Pentingnya Persepsi

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang baik merupakan perilaku yang diinginkan. Penampilan perilaku dari setiap personil yang ditunjuk dalam mengelola dana BOS dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang sifatnya material maupun non material. Salah satu faktor yang bersifat non material adalah persepsi guru terhadap pengelolaan dana BOS. Persepsi ini dapat mempengaruhi bentuk, sikap

dan perilaku yang diharapkan terutama dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah ini.

c. Proses persepsi

Seseorang dalam mempersepsikan sesuatu objek terlebih dahulu melalui suatu proses yang berurutan. Proses tersebut terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan saling menunjang antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya.

Menurut Filley et. Al dalam Gibson yang dikutip Mudjiran (1998: 112) proses persepsi meliputi:

- 1) Seleksi (secrening) yaitu proses psikologik yang sangat erat hubungannya dengan pengamatan atau stimulus yang diterima dari luar ;
- 2) Interpretase, yaitu proses mengorganisaikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang :
- 3) Interpretasi dari persepsi itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi

Menurut Freuk dalam Gibson et. al dikutip Mudjiran (1988) persepsi itu melalui enam proses yaitu: “a) proses menerima, b) proses menyeleksi, c) proses mengorganisasikan, d) proses mengartikan, e) proses menguji, dan f) proses memberi arti”.

Berdasarkan batasan yang dikemukakan oleh ahli di ats, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dalam mempersepsikan suatu objek dilingkungannya melalui beberapa proses yaitu: proses menerima rangsangan, kemudian rangsangan tersebut diinterpretasikan, lalu dilanjutkan dengan pemberian arti, barulah berulah memberikan reaksi

terhadap rangsangan yang diterima tersebut. Reaksi tersebut berwujud tingkah laku, baik perkataan maupun perbuatan atau perilaku.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Seseorang dalam membandingkan suatu objek belum tentu mempunyai arti yang sama dengan orang lain. Dengan kata lain seseorang dapat saja mempunyai persepsi yang berbeda dengan orang lain tentang objek yang sama. Perbedaan persepsi seseorang tersebut menurut Indrawijaya, (1986: 48) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor lingkungan secara sempit menyangkut masalah bunyi, warna, sinar dan secara luas menyangkut masalah ekonomi, sosial dan politik, faktor konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang tentang manusia dengan segala tindakannya, faktor berkaitan dengan konsep tentang dirinya sendiri dan faktor pengalaman masa lampau.

Selanjutnya menurut Sarwoto (1982: 49) perbedaan persepsi seseorang disebabkan oleh:

- 1) Perhatian, biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus, akan tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek.
- 2) Set, artinya harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul
- 3) Kebutuhan, artinya baik kebutuhan sesaat maupun kebutuhan yang ditetapkan oleh diri seseorang dan juga kebutuhan yang berbeda.
- 4) Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat
- 5) Ciri kepribadian seseorang.

Senada dengan pendapat di atas, Oskam dalam James L. Gipsen et. al (1984: 55) mengemukakan bahwa persepsi seseorang di pengaruhi oleh: a) ciri – ciri khas dari objek stimulus yang terdiri dari nilai objek itu bagi orang yang mempersepsikannya, maksudnya seberapa jauh objek tersebut menyenangkan bagi seseorang, familiaritas atau pengenalan seseorang dengan objek tersebut dan intensitas hubungan seseorang dengan objek, b) faktor – faktor pribadi, termasuk didalamnya ciri khas individu seperti taraf kecerdasan, minat, emosional, c) factor pengaruh kelompok artinya respon orang lain dapat memberi arah kesuatu tingkah laku, dan d) faktor perbedaan latar belakang kultural.

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang berarti selenggara sebagaimana dikemukakan Panglaykim dan Tanzil (1991: 26) pengelolaan/manajemen adalah “proses, dengan mana pelaksanaan dari pada suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi”. Lebih lanjut Terry yang dikutip Panglaykim Tanzil (1991: 38) menjelaskan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah “mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan-

kegiatan orang lain”. Kemudian Poerwadarminta (1961: 412) disebutkan bahwa “pengelolaan berarti penyelenggaraan”.

Sehubungan dengan pengertian pengelolaan tersebut, Julitriasa dan Suprihanto (1992: 1) menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah “suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai suatu tujuan dengan efektif serta efisien dengan menggunakan bantuan/melalui orang lain”. Selanjutnya Kamaluddin yang dikutip Irsyad (2000: 3) mengemukakan bahwa manajemen/pengelolaan adalah “suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemakaian sumber daya manusia dan materil”.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengelolaan atau lebih dikenal dengan manajemen adalah kemampuan atau keterampilan seseorang dalam mengurus atau mengelola sesuatu kegiatan dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

b. Pengelolaan Keuangan

Keuangan pada dasarnya adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang atau perhitungan, yang merupakan penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran. Sebagaimana dijelaskan Ichwan yang dikutip Deswita (2003: 12)

Keuangan merupakan semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (yang dapat dinilai dengan uang) yang dapat dijadikan milik organisasi atau pengelolaan keuangan.

Keberadaan sekolah sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang pendidikan tidak terlepas dari yang namanya uang, sebagai dana pendidikan. Dana pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk membeli sarana dan prasarana pendidikan. Untuk tercapainya sasaran tersebut diperlukan penyediaan dana yang cukup disertai dengan penataan administrasi yang tertib dan baku, yang dinamakan dengan pengelolaan keuangan.

Menurut Soetjipto (1992: 76) pengelolaan keuangan meliputi :

Kegiatan perencanaan, penggunaan/pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan kegiatan di lingkungan suatu organisasi kerja baik bersifat manajemen administrative maupun manajemen operatif sangat memerlukan perencanaan, pengorganisasian, bimbingan dan pengarahan, kontrol, komunikasi dan juga ketatausahaan. Sehubungan dengan ini Nawawi (1983: 68) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan dapat dilihat dari dua aspek sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan keuangan dalam arti sempit, yang mengandung pengertian segala pencatatan, masuk dan keluarnya uang dalam membiayai kegiatan organisasi kerja berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan,

- 2) Pengelolaan keuangan dalam arti luas mengandung pengertian penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan menyangkut kegiatan perencanaan penggunaan/pemanfaatan pelaporan yang dilakukan secara sah dan efisien. Sah berarti kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Efisien berarti kegiatan tersebut dilakukan dengan perhitungan yang teliti/cermat sehingga jumlah uang yang tersedia dapat mewujudkan hasil kerja yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan mutlak harus dicapai. Dengan kata lain hasil yang diperoleh seimbang dengan jumlah dana yang digunakan, disinilah peranan uang sebagai alat pencapaian tujuan.

3. Dana BOS

a. Pengertian

Dana BOS merupakan dana bantuan yang diberikan pemerintah melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang bertujuan untuk meringankan biaya operasional pendidikan.

Menurut Depdiknas (2006: 8) “Bantuan Operasional Sekolah yang dimaksud dalam PKPS-BBM secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil”. Namun karena biaya satuan

yang digunakan dalam BOS ini adalah rata nasional, maka penggunaan dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi.

Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tergolong dalam biaya operasional non personil, menurut Depdiknas (2006) jenis kegiatan yang dibiayai oleh BOS meliputi:

- 1) Pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru,
- 2) Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan,
- 3) Pembelian bahan-bahan habis pakai,
- 4) Pembiayaan kegiatan kesiswaan,
- 5) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum dan laporan hasil belajar siswa,
- 6) Pengembangan profesi guru,
- 7) Pembiayaan perawatan sekolah,
- 8) Pembiayaan langganan daya dan jasa,
- 9) Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honor,
- 10) Pemberian bantuan untuk transportasi bagi siswa miskin,
- 11) Pembiayaan pengelolaan bos,
- 12) Biaya asrama/pondokan dan pembelian peralatan ibadah khusus untuk pesantren salafiyah.

b. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengelolaan dana BOS haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Tim Manajemen BOS Kota Padang, (2008) Bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dana BOS meliputi: “transparan, akuntabel, tertib administrasi keuangan (jangan sampai ada warga sekolah yang tidak tahu tentang RAB dan Penggunaan Dana BOS)”.

RAPBS sekolah yang dibiayai dana BOS haruslah disusun dan disepakati oleh kepala sekolah bersama guru-guru dalam penyusunan Program Kerja Tahunan Sekolah. RAPBS ini selanjutnya dikomunikasikan dengan komite sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi dalam hal ini harus ada keterbukaan antara kepala sekolah, guru dan komite sekolah terhadap pengelolaan dana BOS (Depdikbud, 1998).

Dalam penyusunan anggaran akan terdapat banyak usulan rencana. Diantara sekian banyak usulan rencana dalam pelaksanaannya perlu ditentukan prioritas secara selektif. Mendahulukan mana yang termasuk paling mendesak, paling sesuai dan paling tepat untuk dilaksanakan, (Depdikbud : 1998).

Tim Manajemen BOS Kota Padang, (2008) mengemukakan bahwa prinsip pengelolaan keuangan dana BOS haruslah transparan, akuntabel, tertib administrasi keuangan (jangan sampai ada warga sekolah yang tidak tahu tentang RAB dan penggunaan Dana BOS). Pengelolaan dana BOS meliputi tiga tahap yaitu:

1) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana BOS

Sekolah merupakan inti pelaksana teknis mempunyai program yang harus didukung oleh rencana penggunaan dana BOS yang memadai. Hal tersebut harus dituangkan ke dalam program atau rencana penggunaan dana BOS yang selanjutnya dapat disebut sebagai anggaran penggunaan dana BOS. Sehubungan dengan itu Sumosudirjo (1982: 20) mengatakan bahwa :

Anggaran yang diserahkan merupakan pedoman, batasan sekaligus program kerja sekolah dalam melaksanakan tugas di segala lapangan, selain itu berbeperan sebagai penggerak dalam mengurus keuangan.

Selanjutnya Nawawi (1983: 68) mengemukakan pula sebagai berikut :

“Suatu rencana keuangan yang disusun untuk mewujudkan kegiatan usaha kerjasama guna mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya untuk satu tahun”.

Menurut Depdiknas (2005) penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah Dana BOS ditujukan untuk kegiatan :

- 1) Pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang,
- 2) Biaya ujian sekolah (ulangan umum dan harian),
- 3) Memberi bantuan siswa miskin,
- 4) Membayar honorium guru honorer, dan
- 5) Biaya kegiatan kesiswaan.

Penyusunan rencana penggunaan dana BOS ini menurut Depdiknas dan Departemen Agama (2006) haruslah:

a) Selektif

Selektif berarti “secara dipilih atau mempunyai daya pilih”. Berdasarkan pengertian tersebut selektif dalam penyusunan rencana penggunaan dana BOS berarti setiap rencana yang akan dibuat dan disusun haruslah dipilih mana kebutuhan yang paling penting dan mendesak untuk sekolah dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting, sehingga tercipta kesesuaian kemampuan yang dimiliki dan kebutuhan yang diperlukan.

Penyusunan rencana Dana BOS diseleksi terlebih dahulu, berdasarkan urutan langkah-langkah yang telah ditetapkan, kebutuhan-kebutuhan sekolah menurut tingkat kepentingannya.

b) Keterlibatan

Keterlibatan adalah “suatu keadaan turut terbawa-bawa dalam suatu masalah”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keterlibatan dalam pembahasan ini adalah suatu keadaan dimana setiap personil sekolah diikutsertakan dalam penyusunan rencana. Komponen sekolah tersebut meliputi: guru, komite sekolah dan masukan masyarakat. Dengan keikutsertaan komponen sekolah dalam penyusunan rencana berarti guru, komite sekolah dan masyarakat telah terlibat dalam penyusunan rencana tersebut.

c) Kesepakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:919) kesepakatan berasal dari kata sepakat yang berarti “setuju, semufakat, sependapat”. Dalam hal ini kesepakatan yang dimaksud adalah adanya kesepakatan bersama antara kepala sekolah dewan guru dan komite sekolah terhadap keputusan yang diambil, mengenai pelaksanaan penggunaan dana BOS.

2) Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari APBS dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya.

Penggunaan dana BOS yang akan dikelola dalam organisasi sekolah juga cukup banyak sebagaimana dikemukakan Depdiknas (2006: 16-17) meliputi: a) pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru, b) pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan, c) pembelian bahan-bahan habis pakai, d) pembiayaan kegiatan kesiswaan, e) pembiayaan ulangan harian, ulangan umum dan laporan hasil belajar siswa, f) pengembangan profesi guru, g) pembiayaan perawatan sekolah, h) pembiayaan langganan daya dan jasa, i) pembayaran honorium

guru dan tenaga kependidikan honor, j) pemberian bantuan untuk transportasi bagi siswa miskin, k) pembiayaan pengelolaan BOS, l) biaya asrama/pondokan dan pembelian peralatan ibadah khusus untuk pesantren salafiyah.

Adapun kegiatan penting yang dilakukan dalam penggunaan dana BOS meliputi: pengaturan alokasi dana, penggunaan dana, relevansi penggunaan dana dengan mata anggaran yang telah ditentukan, pencatatan keuangan masuk dan pencatatan keuangan keluar.

Prinsip-prinsip pelaksanaan penggunaan anggaran belanja/pengeluaran negara diantaranya adalah: a) hemat, tida efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang di syaratkan, b) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi masing-masing departemen/lembaga (Pengelolaan Keuangan Pendidikan, Bahan Ajar Administrasi Pendidikan FIP UNP).

Penggunaan Dana BOS di Sekolah dan Madrasah harus didasarkan kepada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kelapa Sekolah/Dewan Guru dengan Komite Sekolah/Madrasah (Depdiknas – Depag, 2005).

Menurut Tim Manajemen BOS Kota Padang (2008) bahwa pengelolaan dana harus transparan dengan menggunakan metode membuat papan pengumuman tentang penggunaan Dana BOS.

Menurut Dekdiknas (2006) bahwa pengeluaran Dana harus sesuai dengan uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan bentuknya.

Dari uraian di atas maka terlihat bahwa prinsip pelaksanaan penggunaan dana BOS ini meliputi:

a) Keterlibatan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterlibatan merupakan “suatu keadaan turut terbawa-bawa dalam suatu masalah”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keterlibatan dalam pembahasan ini adalah suatu keadaan dimana setiap personil sekolah diikutsertakan dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS.

Komponen sekolah yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS meliputi: guru, komite sekolah dan masyarakat. Dengan keikutsertaan komponen sekolah tersebut dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS, berarti guru, komite sekolah dan masyarakat telah terlibat dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS tersebut.

b) Transparan

Dalam hal ini komponen sekolah dapat mengetahui penggunaan dana BOS dan pemegang atau pengelola dana BOS haruslah memberitahukan pelaksanaan penggunaan dana BOS yang

dilakukan. Kemudian mendiskusikan secara terbuka rencana pemanfaatan dana dengan seluruh dewan guru.

c) Ketepatan

Ketepatan adalah “(keadaan, sifat) tepat, ketelitian, kejituan”. Dalam hal ini penggunaan dana BOS harus tepat dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

3) Pelaporan Penggunaan Dana BOS

Semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan format yang telah disediakan dalam buku pedoman administrasi keuangan sekolah, seperti format Rangkuman Keuangan Sekolah (RKS), dan format keuangan sekolah sebagaimana dinyatakan Depdikbud (1993: 34) sebagai berikut :

Semua laporan dalam rangkap tiga dan dikirim kepada: (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kotamadya/ Kota dan (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I atau Provinsi.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.8 tahun 2006 dijelaskan bahwa: Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Pelaporan pelaksanaan APBS dana BOS harus diiringi dengan pertanggung jawaban. Artinya laporan keuangan tidak hanya dalam bentuk format semata, akan tetapi diiringi dengan

penjelasan-penjelasan yang rasional dan logis mengenai sumber keuangan dana BOS dan kemana saja dana BOS tersebut digunakan, sehingga jelas implementasi pengelolaan dana BOS sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.

Menurut Depdiknas (2005: 32) secara umum hal-hal yang dilaporkan pelaksana program pemberian Bantuan Operasional Sekolah dalam hal ini kepada sekolah meliputi: “1) penyaluran dana, 2) pemanfaatan dana, 3) hasil monitoring evaluasi, dan 4) pengaduan masalah”. Semua kegiatan ini harus dilaporkan dengan ringkas dan jelas kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan program ini PKPS-BBM.

Menurut Tim Manajemen BOS Kota Padang, tidak melalaikan pembelanjaan kegiatan, sehingga laporan juga tidak terlambat. Bila perlu, sekolah membentuk tim pengelolaan Dana BOS yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Pengadaan Barang dan Pemegag Inventaris.

Dalam pelaporan penggunaan Dana BOS menurut Tim PKPS Kota Padang Tahun 2008 semua kwitansi/amprah harus dituliskan nilai uang yang diterima oleh yang berhak dan ditanda tangani oleh si penerima uang.

Pelaksanaan pelaporan penggunaan Dana BOS ini menurut Depdiknas dan Departemen Agama (2006) meliputi aspek-aspek:

a) Keterlibatan

Keterlibatan pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh pengelola yaitu melibatkan pengelola di tiap tingkatan. Ditingkat sekolah melibatkan Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.

b) Kesesuaian

Dalam hal ini harus ada kecocokan atau kesesuaian antara laporan yang telah dibuat dengan pelaksanaan dan rencana yang telah dilakukan. Jadi pelaporan dengan pelaksanaan dan rencana program yang telah ditetapkan tidak boleh menyimpang dari petunjuk yang ada.

c) Ketepatan

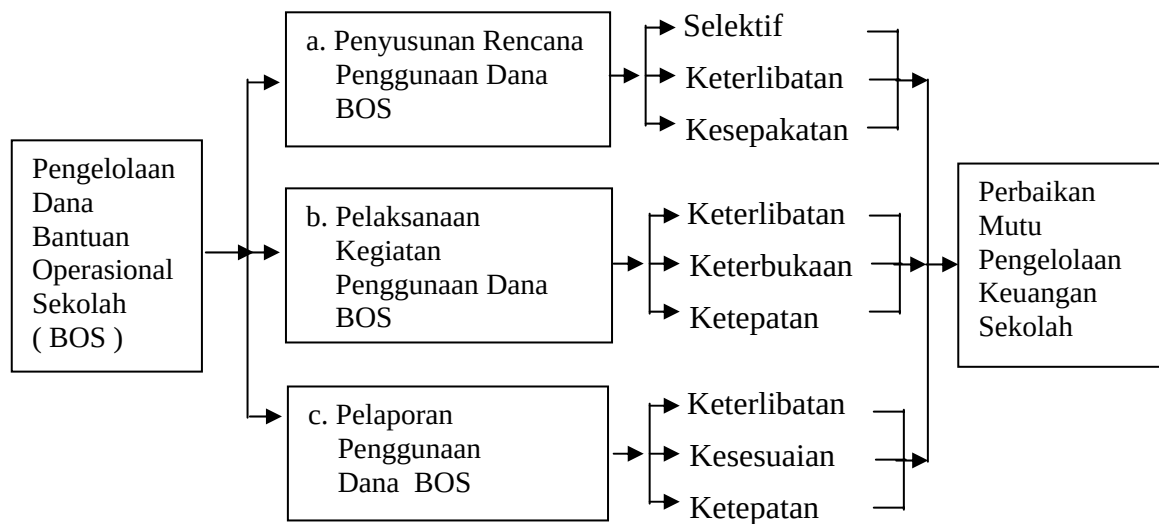
Dalam hal ini pelaporan penggunaan dana BOS ini harus tepat, dan teliti baik dalam penggunaannya maupun waktu pelaporannya dengan demikian maka tidak akan timbul masalah di lapangan.

B. Kerangka Konseptual

Guna menunjang tercapainya tertib administrasi keuangan dalam dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang, maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan dana BOS dengan baik oleh kepala sekolah. Pengelolaan keuangan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pemanfaatan dana BOS. Kegiatan pengelolaan dana BOS di sekolah meliputi: Penyusunan rencana penggunaan

dana BOS, penggunaan dana BOS, monitoring penggunaan dana BOS dan pelaporan penggunaan dana BOS.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah digambarkan kerangka konseptual mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kepala Sekolah di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi guru terhadap penyusunan rencana penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang termasuk dalam kategori cukup baik, dengan skor rata-rata 2,61. Ini berarti bahwa penyusunan rencana penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang sudah terlaksana dengan cukup baik.
2. Persepsi guru terhadap pelaksanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang termasuk dalam kategori kurang baik, dengan skor rata-rata 2,30. Ini berarti bahwa pelaksanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang kurang terlaksana dengan baik.
3. Persepsi guru terhadap pelaporan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang termasuk dalam kategori cukup baik, dengan skor rata-rata 2,56. Ini berarti bahwa pelaporan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang sudah terlaksana dengan cukup baik.

4. Secara umum dapat dikatakan bahwa persepsi guru terhadap pengelolaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang termasuk dalam kategori kurang baik, dengan skor rata-rata 2,49. Ini berarti bahwa pengelolaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang kurang terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

1. Mengingat penyusunan rencana penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang baru berada pada kategori cukup baik, untuk itu disarankan agar kepala sekolah melibatkan semua warga sekolah baik guru, orangtua siswa maupun komite sekolah dalam menyusun rencana penggunaan dana BOS, sehingga rencana penggunaan dana BOS dimasa mendatang dapat disusun dengan lebih baik.
2. Mengingat pelaksanaan penggunaan dana BOS sebagai salah satu aspek dari pengelolaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota masih kurang baik, untuk itu disarankan kepada kepala sekolah sebagai pihak pengelola agar selalu berupaya menggunakan dana BOS dengan sebaik-baiknya dengan cara mengatur penggunaan dana BOS secara proporsional, mencatat keuangan masuk dan keluar, serta mendahulukan kepentingan yang

mendesak berdasarkan mata anggaran yang sudah disusun, sehingga penggunaan dana BOS menjadi lebih baik dimasa mendatang.

3. Selanjutnya pelaporan penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang baru berada pada kategori cukup baik, untuk itu disarankan agar kepala sekolah meminta Tim PKPS-BBM Kota meningkatkan lagi pelaporan penggunaan dana BOS yang dilakukannya dengan cara sering datang ke sekolah untuk melakukan inspeksi atau pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai pihak pengelola, sehingga pelaporan penggunaan dana BOS dimasa mendatang akan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Putra: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (1987). *Prosedur Program Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara
- Depdikbud RI. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- Depdikbud RI. (1993). *Pedoman Pengelolaan Administrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Depdikbud. Dirjen Dikdasmen Direktorat Sarana Pendidikan: Jakarta
- Depdikbud R.I. (1998). *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta : Sirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bekerjasama dengan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
- Depdikbud RI. (2001). *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*. Bumi Balai Pustaka: Jakarta
- Depdiknas dan Departemen Agama. (2005). *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah: SD, SDLB, MI, Salafiyah/Sekolah Agama Non Islam Setara SD, SMP, SMPLB, MTS, Salafiyah/Sekolah Agama Non Islam Setara SMP. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan*. Jakarta
- Depdiknas dan Departemen Agama (2005). *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah; Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan*. Jakarta
- Depdiknas dan Departemen Agama (2006). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah; Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan*. Jakarta
- Deswita, Rina. (2003). *Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Pariaman (Skripsi)* .FIP UNP: Padang
- Hadi, Sutrisno. (1989). *Statistik Jilid 2*. Andi Offset: Yogyakarta
- Indrawijaya, Adam. I (1986). *Perilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru.